

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gunanegara, 2008, *Rakyat & Negara, Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, PT Tatanusa, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Harsono, Boedi, 1996, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Koeswahyono, Imam, 2008, *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*, Artikel.
- L. Tanya, Bernard dkk., 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Limbong, Bernhard, 2011, *Pengadaan tanah untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Marbun, SF, Moh. Mahfud MD, 2011, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Parlindungan, AP, 1993, *Pencabutan dan Pembebasan Hak atas Tanah Suatu Studi Perbandingan*, Mandar Maju, Bandung.
- Roosadijo, Marmin M., 1979, *Tinjauan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang ada di Atasnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Safitri, Myrna A. dan Tristan Moeliono., 2010, *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia*, HuMa, Jakarta.
- Salindeho, John, 1993, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan, R, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong, 2004, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, dan Sri Mamuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soimin, Soedharyo, 1993, *Status Hak dan Pengadaan tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Kebijakan Pertanahan: antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.

_____, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta.

_____, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

_____, 2015, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Supranto, J., 1997, *Metode Riset*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah/Tesis-Disertasi

Firdaus, Iif Ikhsan, "Ganti Rugi Pada Pelepasan Hak Atas Tanah Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Setelah Berlakunya Perpres Nomor 65 Tahun 2006 (Studi Kasus pada Pembuang Induk Anggoro Di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara)", *Tesis*, Prodi M.Kn Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2010.

Suprijanto, Agus, "Tinjauan Hukum Nilai Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012", *Tesis*, Prodi M.Kn Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2014.

Wardani, Ayu Kusuma, "Status Hak Atas Tanah Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bawen-Salatiga (Studi Kasus Di Kota Salatiga)", *Tesis*, Prodi M.Kn Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 719.

Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), 2018, Petunjuk Teknis Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (SPI 204).

D. Internet

Damang, “Prinsip Kelayakan Ganti Rugi Atas Penilaian oleh Tim Penilai Harga Tanah”, Negara Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/prinsip-kelayakan-ganti-rugi-atas-penilaian-oleh-tim-penilai-harga-tanah.html>, diakses tanggal 24 Juni 2019

Fiansyah, Rahmat, “Dikebut, Tol Samarinda-Balikpapan Ditarget Beroperasi Awal 2019”, *INews*, <https://www.inews.id/finance/read/170993/dikebut-tol-samarinda-balikpapan-ditarget-beroperasi-awal-2019>, diakses tanggal 9 Maret 2019.

Iqbal, Fadhil, “Skema Pembiayaan jalan tol Balikpapan - Samarinda”, *Kompasiana*, <https://www.kompasiana.com/fadhiliqbal57/5a32d40af1334408e871a882/skema-pembiayaan-jalan-tol-balikpapan-samarinda>, diakses tanggal 24 Juni 2019.

Jaya, V.E, Penilaian Tanah sebagai Sarana Pengambil Keputusan dalam Konsolidasi Tanah, *erestajaya.blogspot*, <http://erestajaya.blogspot.com/2009/01/penilaian-tanah-sebagai-sarana.html>, diakses tanggal 25 Juni 2019